



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (P.RENJA)
(PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja (Renja)) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat.

Akhir kata, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini semoga dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua, 15 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**AMIR HAKIM SIREGAR, S.STP., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP : 198203072 00112 1 002**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
2.1. evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP sampai Triwulan II	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	16
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	17
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	20
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD sampai Triwulan II Tahun Berjalan 7
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

2.1 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, maka landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonomi Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organissi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b) Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPELITBANGDA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP
- 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TRIWULAN II

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sampai Triwulan II

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis berikut

TABEL.2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan(ou tput)	Target Capaian Kinerja RPD Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target program /kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)	Realisa si Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8(7/6)	9		10(5+7+9)		11(10/4)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi investasi PMA/PMDN	20	persen					20	persen	20	persen	100.00%
2.18.02.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan SOP	100	persen					100	persen	100	persen	100.00%
2.18.02.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	33.33%

2.18.02.1.2	Rekomendasi Kebijakan Sektor yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah rekomendasi sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi perizinan berusaha berbasis risiko	15	Dokumen					5	Dokumen	5	Dokumen	33.33%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Investasi yang ditindak lanjuti	9	Persen					3	Persen	3		33.33%
2.18.03.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Terpenuhinya keikutsertaan /Pelaksanaan Pameran/Expo	6						2		2		33.33%
2.18.03.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan	3	Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	33.33%
2.18.03.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	33.33%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	51	persen						persen	0	persen	0.00%
2.18.04.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	70	persen						persen	0	persen	0.00%
2.18.04.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas intensif yang menjadin kewenangan kab/kota	5	Keg Usaha						Keg Usaha	0	Keg Usaha	0.00%

2.18.04..2.01.0 006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sitem perizinan Berusaha Berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku usaha						Pelaku usaha	0	Pelaku usaha	0.00%
------------------------	---	---	-----	--------------	--	--	--	--	--	--------------	---	--------------	-------

2.18.04.1.3	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah kegiatan usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	3	Keg Usaha						Keg Usaha	0	Keg Usaha	0.00%
2.18.04.1.4	Pemantauan ,analisis,evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan analisis,evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	50	Keg Usaha						Keg Usaha	0	Keg Usaha	0.00%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	1,112,4	Triliun rupiah						Triliun rupiah	0	Triliun rupiah	
2.18.05.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	30	Perusahaan						Perusahaan	0	Perusahaan	0.00%
2.18.05.2.01	Pengawasan Penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan di verifikasi data ,profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	30	Perusahaan						Perusahaan	0	Perusahaan	0.00%

2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	10	persen					persen	0	persen	0.00%
2.18.06.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	50	persen					persen	0	persen	0.00%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100	Data					Data	0	Data	0.00%
3.25.01.2.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP Persentase Cakupan Tefcapainya Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	predikat					predikat	0	predikat	predikat
2.18.01.2.01	Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersussunya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja OPD	24	Dokumen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%
2.18.2.01.2.01.001	penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat daerah	6	Dukmen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%
2.18.2.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi	3	Dokumen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%

2.18.2.01.2.01.003	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%
2.18.2.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	3	Dokumen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%
2.18.2.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	3	Dokumen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%
2.18.2.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian	6	Laporan					Laporan	0	Laporan	0.00%
3.25.01.2.02.01.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersussunya Laporan Administrasi Keuangan OPD,	36	Dokumen					Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	36	orang/Bulan					orang/Bulan	0	orang/Bulan	0.00%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	orang/Bulan					orang/Bulan	0	orang/Bulan	0.00%

3.25.01.2.02.0 1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannaya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian OPD	19	Kegiatan						Paket	0	Paket	0.00%
3.25.01.2.02.0 1.1.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket					4	Paket	4	Paket	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.1.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket					1	Paket	1	Paket	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.1.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	12	Paket					4	Paket	4	Paket	33.33%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen					20	Dokumen	20	Dokumen	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket					2	Paket	2	Paket	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.1.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan					10	Laporan	10	Laporan	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5	Kegiatan					1	Kegiatan	1	Kegiatan	20.00%
3.25.01.2.02.0 1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit					4	Unit	4	Unit	33.33%

3.25.01.2.02.0 1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor	9	Kegiatan					3	Kegiatan	3	Kegiatan	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan					12	Laporan	12	Laporan	33.33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan					12	Laporan	12	Laporan	33.33%
3.25.01.2.02.0 1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	orang/bulan					12	orang/bulan	12	orang/bulan	33.33%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

“Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih

Di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu ”

Dengan indikator yang disusun adalah target kinerja dari Nilai AKIP. Indikator tujuan yang ingin dicapai di Tahun 2024 adalah sebesar 63,77 point

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan prima
2. Meningkatnya Jumlah Investasi PMA/PMDN

Sasaran tersebut diatas memiliki indikator yang digunakan mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Peningkatan Pertumbuhan Investasi berskala Nasional PMA/PMDN

Tabel. 3.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayana prima	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	poin	63,77	68,77	73,77
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87,00	89,00	91,00
		Meningkatnya Jumlah Invesatsi PMA/PMDN	Persenatse Pertumbuhan Investasi berskala Nasional PMA /PMDN	Persean	3%	3%	3%

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran Nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
			Meningkatnya derajatnya kesehatan		
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya iklim demokrasi		
			Peningkatan ketangguhan bencana		
			Menurunnya angka kemiskinan		
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani		
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata		
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah		
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
6	Terpenuhinya layanan dasar			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
9	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, innovative dan kreatif			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
17	Meningkatnya konektivitas wilayah			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan				
19	Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien				
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
23	Pembangunan rendah karbon			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
24	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
			Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima		
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah		

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2023 yang lalu, identifikasi isu-isu penting urusan perindustrian, urusan perdagangan serta hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Utara. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dari program rutin dan program prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

Berikut adalah Tabel Program ,Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Padang Lawas Utara

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(10-9)	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								2,601,804,333.00	2,207,722,524.00	-978,673,241.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,601,804,333.00	2,207,722,524.00	-978,673,241.00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2,601,804,333.00	2,207,722,524.00	-978,673,241.00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Persentase Cakupan Tercapainya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP Persentase Cakupan Tercapainya Akuntabilitas Kinerja OPD			100 B Predikat Predikat	B 100 Predikat Predikat	2,477,970,333.00	2,056,720,424.00	225,084,874.00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD</i>			8 Dokumen	8 Dokumen	10,200,400.00	10,200,400.00	7,924,000.00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	752,200.00	752,200.00	372,800.00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1,846,800.00	1,846,800.00	1,467,400.00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua	Kab. Padang Lawas Utara, Semua	1 Dokumen	1 Dokumen	1,918,200.00	1,918,200.00	1,538,800.00	

		<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa					
--	--	---	---	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1,989,600.00	1,989,600.00	1,610,200.00
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1,846,800.00	1,846,800.00	1,467,400.00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	1,846,800.00	1,846,800.00	1,467,400.00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan OPD</i>	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan OPD</i>			12 dokumen 12 Dokumen	12 dokumen 12 Dokumen	1,872,607,933.00	1,337,293,424.00	-686,114,441.00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,714,687,933.00	1,297,333,424.00	-568,154,441.00
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	157,920,000.00	39,960,000.00	-117,960,000.00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian OPD</i>	<i>Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian OPD</i>			- Kegiatan	- Kegiatan	0.00	0.00	0.00

2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-- Paket	-- Paket	0.00	0.00	0.00
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	2 Orang	0.00	0.00	0.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian OPD Terlaksananya pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum OPD</i>	<i>Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian OPD Terlaksananya pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum OPD</i>			6 Kegiatan	6 Kegiatan	183,649,800.00	265,704,400.00	120,521,600.00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Paket	- Paket	0.00	5,677,800.00	5,677,800.00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	27,879,100.00	36,924,100.00	26,041,900.00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5,192,300.00	8,905,700.00	7,245,500.00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	6,725,000.00	16,140,000.00	14,108,000.00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan									

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	14,162,400.00	16,155,200.00	12,237,800.00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	10 Laporan	110,691,000.00	162,901,600.00	55,210,600.00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			- Kegiatan	- Kegiatan	0.00	0.00	0.00
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	- Unit	0.00	0.00	0.00
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	- Unit	0.00	0.00	0.00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	0.00	0.00	0.00
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	- Unit	0.00	0.00	0.00

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor</i>	<i>Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor</i>			3 Kegiatan	3 Kegiatan	329,508,200.00	334,008,200.00	-84,891,800.00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	26,000,000.00	27,500,000.00	26,500,000.00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	72,900,000.00	75,900,000.00	-90,000,000.00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	230,608,200.00	230,608,200.00	-21,391,800.00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>			1 Kegiatan	1 Kegiatan	82,004,000.00	109,514,000.00	32,530,000.00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	82,004,000.00	87,024,000.00	10,040,000.00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	- Unit	0.00	22,490,000.00	22,490,000.00
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	- Unit	0.00	0.00	0.00

2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA/PMDN	Persentase realisasi investasi PMA/PMDN			20 persen	20 persen	14,543,600.00	21,509,600.00	5,595,200.00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kesesuaian Pelaksanaan pemberian fasilitas /intensif dan kemudahan penanaman modal dengan SOP</i>	<i>Persentase kesesuaian Pelaksanaan pemberian fasilitas /intensif dan kemudahan penanaman modal dengan SOP</i>			100 %	100 %	14,543,600.00	21,509,600.00	20,604,800.00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
		<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,161,200.00	14,127,200.00	13,668,200.00
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko									
		<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	10,382,400.00	7,382,400.00	6,936,600.00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase Wilayah yang telah Teridentifikasi Peta Potensinya</i>	<i>Persentase Wilayah yang telah Teridentifikasi Peta Potensinya</i>			- %	- %	0.00	0.00	0.00
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Dokumen	- Dokumen	0.00	0.00	0.00
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kesepakatan investasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Kesepakatan investasi yang ditindaklanjuti			2 persen	2 persen	19,886,500.00	26,936,500.00	31,559,600.00

2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya Keikutsertaan /Pelaksanaan pameran/Expo</i>	<i>Terpenuhinya Keikutsertaan /Pelaksanaan pameran/Expo</i>			2 Kegiatan	2 Kegiatan	19,886,500.00	26,936,500.00	7,996,100.00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	13,730,500.00	20,780,500.00	2,299,100.00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6,156,000.00	6,156,000.00	5,697,000.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan perizinan dan Nonperizinan yang sesuai dengan SOP	Persentase penerbitan perizinan dan Nonperizinan yang sesuai dengan SOP			51 Persen	51 Persen	74,036,300.00	80,252,400.00	6,063,700.00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase pelayanan perizinan dan Non perizinan yang Dilayani</i> <i>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani</i>	<i>Persentase pelayanan perizinan dan Non perizinan yang Dilayani</i> <i>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani</i>			70 %	70 %	74,036,300.00	80,252,400.00	71,316,100.00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
		<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	1,071,400.00	1,071,400.00	0.00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	55,596,000.00	55,596,000.00	54,000,000.00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									

		<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	832,500.00	832,500.00	0.00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
		<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	16,536,400.00	22,752,500.00	17,316,100.00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi investasi PMA/PMDN	Jumlah realisasi investasi PMA/PMDN			1,112,4 Rupiah	1,112,4 Rupiah	14,904,000.00	21,840,000.00	-60,399,600.00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</i>	<i>Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</i>			30 Perusahaan	30 Perusahaan	14,904,000.00	21,840,000.00	-468,559,600.00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0.00	0.00	-449,921,200.00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									

		<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	14,904,000.00	21,840,000.00	-18,638,400.00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data,informasi,dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan data,informasi,dan sistem informasi penanaman modal			10 persen	10 persen	463,600.00	463,600.00	536,400.00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan data Informasi dan Sistem Informasi yang terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Persentase Pengelolaan data Informasi dan Sistem Informasi yang terintegrasi secara Elektronik</i>			50 %	50 %	463,600.00	463,600.00	0.00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	100 Dokumen	463,600.00	463,600.00	0.00

BAB IV
PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

Gunungtua, 15 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



AMIR HAQIM SIREGAR, S.STP., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP : 198203072 00112 1 002

